

## MILKLIFE FESTIVAL KELUARGA SEHAT 2024 Kampanye Pencegahan Stunting Sebelum Genting

**KUDUS (KR)** - MilkLife Festival Keluarga Sehat 2024 selama dua hari kemarin di Alun-alun Simpang Tujuh Kudus, menghadirkan berbagai kegiatan edukasi. Kegiatan itu bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran orang tua dalam pencegahan stunting. Acara ini merupakan hasil kolaborasi antara Djarum Foundation, MilkLife, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus yang mengajak seluruh lapisan masyarakat, mulai dari remaja hingga orangtua, untuk bersama-sama mencegah bahaya stunting sejak dini.

MilkLife Festival Keluarga Sehat 2024 mengangkat tema "Cegah Stunting Sebelum Genting", dengan tujuan untuk mengedukasi masyarakat Kudus tentang pentingnya peran orangtua dalam memenuhi kebutuhan gizi anak sejak masa kehamilan hingga tumbuh kembang balita. Hadir di kegiatan festival ini, ribuan warga yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, pasangan usia subur, remaja putri, serta masyarakat umum.

Penjabat (Pj) Bupati Kudus Muhammad Hasan Chabibie menyatakan bahwa pencegahan stunting harus dimulai dari keluarga. orangtua, terutama ibu, memiliki peran penting dalam memberikan asupan gizi yang baik kepada anak-anak mereka. "Pengetahuan orangtua tentang makanan bergizi, cara pengolahan, dan aturan makannya sangat krusial untuk mencegah stunting pada anak," ungkapnya. Hasan Chabibie juga mengapresiasi Djarum Foundation dan MilkLife yang telah menginisiasi program pencegahan stunting ini. Ia berharap kerja sama antara pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat dapat mempercepat penurunan angka stunting di Kabupaten Kudus.

Achmad Budiharto, Deputy Program Director Bakti Sosial Djarum Foundation, menyampaikan bahwa MilkLife Festival Keluarga Sehat 2024 merupakan upaya untuk memperluas kesadaran masyarakat tentang stunting. Ia menyadari bahwa angka stunting di Kudus masih cukup tinggi, salah satunya disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang dampak buruk gizi buruk pada anak-anak mereka. "Melalui festival ini, kami ingin memberikan edukasi tentang pentingnya deteksi dini, intervensi yang tepat, dan perawatan yang dapat mencegah stunting," kata Budiharto.

Ia juga menjelaskan bahwa Djarum Foundation telah menjalankan Gerakan Menjaga Periode Emas (GEMAS) sejak 2018, yang berfokus pada pemantauan kesehatan ibu hamil dan pertumbuhan anak-anak di bawah usia dua tahun. Sejauh ini, program ini telah berhasil menurunkan angka stunting internal perusahaan dari 18 persen menjadi 7,5 persen hingga September 2024.

Program GEMAS yang dimulai di lingkungan perusahaan ini mencakup pemantauan kehamilan ibu hamil, pertumbuhan balita, serta mendukung proses laktasi ibu menyusui.

Sejak dimulai, program ini telah memantau lebih dari 5.000 kehamilan dan lebih dari 8.000 balita, dengan hasil yang menggembirakan. Budiharto menambahkan, pencegahan stunting juga melibatkan aspek-aspek lain seperti Stimulasi, Deteksi, dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK). SDIDTK merupakan upaya untuk memantau tumbuh kembang balita agar dapat berkembang secara optimal. (Tra)-d



KR-Istimewa

Pemeriksaan ibu hamil dalam Festival MilkLife Keluarga Sehat 2024 di Kudus.

## Pabrik Garmen Terbakar

**MAGELANG (KR)** - Kebakaran yang terjadi di sebuah pabrik garmen di wilayah Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang, Minggu (8/12) siang, memperoleh perhatian Pj Bupati Magelang Sepyo Achanto. Bersama Kapolresta Magelang Kombes Pol Mustofa SIK MH, Komandan Kodim 0705/Magelang Letkol Inf Jarot Susanto SH MSI, Kepala Pelaksana Harian (Kalahar) BPBD Kabupaten Magelang Edi Wasono SH maupun lainnya melakukan kunjungan ke lokasi kebakaran, Senin (9/12). Kedatangan Pj Bupati Magelang dan rombongan disambut dari pihak pabrik atau perusahaan. Setelah meninjau beberapa lokasi, Pj Bupati Magelang juga sempat menemui sejumlah karyawan.

Kepada wartawan usai melakukan pengecekan di lokasi kebakaran, Kapolresta Magelang mengatakan pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pihak Laboratorium Forensik (Labfor). Biasanya dari Labfor akan melaksanakan pemeriksaan atau Olah TKP manakala lokasi kejadian perkaranya sudah dingin. Senin kemarin keputulan asap masih terlihat di beberapa titik.

Juga bekerja sama dengan pihak Pemadam Kebakaran untuk memastikan apakah benar-benar sudah padam semuanya. "Kalau sudah padam semuanya, dan Labfor bisa masuk, sesegera mungkin dilaksanakan Olah TKP. Yang melakukan olah TKP dari pihak Labfor bekerja sama dengan Sat Reskrim Polresta Magelang," katanya.

Pj Bupati Magelang kepada wartawan diantaranya mengatakan semua, baik Pemerintah Kabupaten Magelang maupun seluruh unsur Forkopimda Kabupaten Magelang, sesuai kewenangannya, akan mendukung berkaitan dengan upaya mengatasi kejadian Minggu siang tersebut. Seluruh karyawan dan karyawan juga diminta terus ada komunikasi dengan perusahaan, dan ini proses untuk melakukan langkah-langkah terbaik. (Tha)-d



KR-Thoha

Pj Bupati Magelang, Kapolresta Magelang, Komandan Kodim 0705/Magelang meninjau lokasi kebakaran.



KR-Chandra AN

**BATIK** makin digemari wisatawan manca yang datang ke Indonesia untuk souvenir atau oleh-oleh wisata. Hal ini diakui oleh pengelola Kampung Batik Kampoeng Djadoel Kota Lama Semarang, Ign Luwiyanto. Saat kedatangan mereka (wisatawan) di Kampung Batik Semarang, para pembatik dan pemilik galeri mengaku menerima dampak ekonomi dari kunjungan turis. Mereka banyak yang tertarik dan membeli produk batik dari kain hingga pakaian jadi.

## RAKORNAS KNGI BERLANGSUNG DI KEBUMEN

# Tantangan Mewujudkan Ekonomi Hijau dan Biru

**KEBUMEN (KR)** - Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komite Nasional Geopark Indonesia (KNGI) Tahun 2024 berlangsung di Kebumen. Rakornas menjadi ajang memperkuat sinergi dan meningkatkan kolaborasi dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan geopark, meningkatkan peran geopark dalam mendukung ekonomi hijau dan biru, serta pengembangan pariwisata berkelanjutan.

Rakornas yang berlangsung 4-7 Desember 2024, dibuka oleh Deputy Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Dr Vivi Yulaswati. Pesertanya, perwakilan geopark di seluruh Indonesia, kementerian, pemerintah daerah, lembaga terkait, serta berbagai pihak yang berperan dalam pengembangan

geopark di Indonesia.

Vivi menegaskan pentingnya konsep ekonomi hijau dan biru dalam pengembangan geopark. Disinggung pula geopark dengan wilayah pegunungan, pantai, dan laut, memiliki potensi sangat besar dalam menurunkan emisi gas rumah kaca melalui penyerapan dan penyimpanan karbon. Karena itu

dari Rakornas KNGI, diharapkan geopark di Indonesia semakin lestari dengan diikuti meningkatnya kesejahteraan masyarakat, dan berkembangnya pariwisata yang berkelanjutan.

Selama mengikuti rekornas, peserta diajak menikmati pesona unik dan keren di biosite dan geosite Geopark Kebumen, seperti

hutan mangrove, Pantai Menganti, dan konservasi penyu di Pantai Kembar Terpadu Puring. Dari kunjungannya, mereka mengakui keunikan dan keindahan kawasan Geopark Kebumen sehingga layak Geopark Kebumen menjadi bagian UNESCO Global Geopark (UGGp).

General Manager Badan Pengelola Geopark Kebumen, Sigit Tri Prabowo, mengatakan, Geopark Kebumen telah lolos sidang untuk menjadi bagian UGGp. Dijadwalkan, sertifikat keanggotaan UGGp untuk Geopark Kebumen, diserahkan awal tahun

2025. Menurutnya, Geopark Kebumen memiliki luas daratan 1.138,70 kilometer persegi, dan luas lautan 21,98 kilometer persegi, meliputi 22 kecamatan dengan 374 desa.

Sekda Kebumen Edi Rianto bangga Kebumen menjadi tuan rumah Rakornas KNGI Tahun 2024. Rakornas KNGI dikatakan sebagai ajang pemanasan bagi Kebumen yang akan menjadi tuan rumah kegiatan bertaraf internasional, yakni International Geotourism International Festival & Conference atau GeoFest 2025. (Suk)-d

## DIGELAR DI KABUPATEN DAN KOTA MAGELANG

# Apel Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana

**MAGELANG (KR)** - Apel Kesiapsiagaan Menghadapi Hidrometeorologi di wilayah Kabupaten Magelang dilaksanakan di halaman depan Komplek Kantor Sekretariat Pemerintah Kabupaten Magelang, dan dipimpin Pj Bupati Magelang Sepyo Achanto, Senin (9/12). Didampingi Kapolresta Magelang Kombes Pol Mustofa SIK MH, Komandan Kodim 0705/Magelang Letkol Inf Jarot Susanto SH MSI maupun lainnya, Pj Bupati Magelang juga melakukan pemeriksaan terhadap beberapa perlengkapan dan peralatan yang ditampilkan di lokasi kegiatan.

Pj Bupati Magelang diantaranya mengatakan apel kesiapsiagaan ini merupakan bagian dari sistem pencegahan dan mitigasi untuk mengurangi risiko bencana secara terorganisir, terpadu, cepat, dan tanggap. Selain itu, untuk meningkatkan sensitifitas terhadap kerawanan bencana, terutama bencana banjir, baik banjir bandang maupun banjir lahar dingin dan bencana tanah longsor.

Mendasari surat dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geo-

fisika Stasiun Klimatologi Jawa Tengah Nomor : t/kl.00.02/083/dk/x/2024 Tanggal 7 November 2024 tentang Prediksi Musim Hujan 2024/2025 di Jawa Tengah, bahwa puncak musim hujan di wilayah Jawa Tengah umumnya diperkirakan terjadi pada bulan Februari 2025. Potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrim diprediksi akan meningkat, terutama di daerah rawan bencana di Jateng.

Kabupaten Magelang memiliki ancaman bencana banjir dan tanah longsor yang sangat nyata, serta ancaman banjir lahar dingin, pada sungai yang berhulu di Gunung Merapi, antara lain Sungai Putih, Sungai Krasak, Sungai Senowo, Sungai Lamat, Sungai Pabelan dan Sungai Trinsing. "Oleh karena itu, kita perlu memastikan bahwa kita telah siap, untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi," katanya.

Dari pantauan perkembangan kejadian bencana di wilayah, melalui laporan dari BPBD Kabupaten Magelang, pada rentan waktu bulan Oktober hingga tang-

gal 8 Desember 2024, tercatat sebanyak 102 kejadian bencana. Cuaca ekstrem menjadi bencana yang paling dominan dengan 45 kejadian, disusul tanah longsor sebanyak 33 kejadian. Selain itu, terdapat 9 kejadian kebakaran rumah, dan 1 kejadian kebakaran hutan dan lahan, serta 2 kejadian bencana kekeringan. Angka-angka ini mengingatkan kita akan pentingnya mitigasi yang efektif dan kesiapsiagaan kolektif untuk melindungi masyarakat dari dampak bencana.

Juga dikatakan, apel kesiapsiagaan ini, bukan hanya tentang alat dan perlengkapan saja, tetapi juga koordinasi dan kesiapan mental dalam menghadapi situasi darurat sangat dibutuhkan. Kita harus mampu bekerja sama, saling mendukung, dan cepat tanggap dalam merespons setiap potensi bencana.

Kerjasama seluruh jajaran antara lain pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, Basarnas, relawan, dan seluruh stakeholder serta komponen masyarakat, sangat diperlukan guna memperkuat sinergi dan memastikan bahwa lang-

kah-langkah antisipatif telah disiapkan dengan matang.

Apel Gelar Pasukan Kesiapsiagaan Bencana untuk menanggulangi potensi bencana alam di wilayah Kota Magelang juga dilaksanakan di Polres Magelang Kota bersama berbagai instansi terkait, melibatkan 396 personel dari TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, PMI, SAR, Tanggap Bencana, serta instansi lainnya.

Kapolres Magelang Kota AKBP Dhanang Bagus Anggoro SIK MH saat memimpin apel menjelaskan bahwa tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memastikan kesiapsiagaan seluruh aparat terkait dalam menghadapi bencana alam yang dapat terjadi di wilayah Kota Magelang. "Kami bersama TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, PMI, SAR, Tanggap Bencana, serta instansi lainnya menyiapkan personel dan peralatan untuk menanggulangi bencana di wilayah Kota Magelang. Kami juga telah memetakan lokasi-lokasi yang rawan bencana, meskipun secara umum, situasi di Kota Magelang saat ini masih kondusif," kata Kapolres Magelang Kota. (Tha)-d

# Pajak Atas Investasi Emas, Tak Perlu Cemas

**PAJAK** emas merujuk pada kebijakan pemerintah Indonesia yang mengenakan pajak atas transaksi jual-beli emas, baik dalam bentuk fisik maupun digital termasuk jasa terkait emas. Ini bisa meliputi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau pajak penghasilan (PPh) atas keuntungan dari perdagangan emas. Kebijakan pajak emas diterapkan untuk beberapa alasan antara lain sebagai sumber pendapatan negara yang dapat digunakan untuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur. Kemudian sebagai regulasi pasar emas untuk mengatur dan mengawasi pasar emas agar tidak terjadi spekulasi yang merugikan perekonomian.

Tak kalah penting untuk kepatuhan pajak, dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelaku pasar tentang kewajiban pajak yang berlaku. Pajak emas pertama kali diterapkan pada tahun 1986 dengan pengenaan PPN ditanggung oleh pemerintah (DTP) atas penyerahan emas batangan oleh PT Antam. Kebijakan ini terus berkembang sesuai dengan per-

ubahan peraturan perpajakan, yang mencakup pengenaan PPh bagi pelaku perdagangan emas.

Kebijakan ini berlaku di seluruh Indonesia, baik untuk perdagangan emas fisik maupun digital. Semua transaksi yang melibatkan emas, baik di pasar tradisional, toko perhiasan, ataupun platform perdagangan online (seperti platform investasi emas digital), dapat dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Muncul pertanyaan siapa saja yang terpengaruh oleh kebijakan pajak emas.

Pertama adalah pemerintah sebagai penerima pajak dan pengatur kebijakan. Kedua yaitu para pelaku usaha dan pedagang emas baik pedagang besar (misalnya di pasar modal atau eksportir) maupun pedagang kecil, seperti toko perhiasan. Terakhir adalah investor emas dan masyarakat umum yang membeli atau menjual emas sebagai alat investasi atau untuk tujuan lain.

Implementasi kebijakan pajak emas di Indonesia diatur melalui PMK Nomor 48 Tahun 2023. Pengenaan Pajak Pertambahan

Nilai (PPN) atas transaksi emas termasuk jasa yang berkaitan dengan emas dikenakan PPN. Pajak selanjutnya adalah Pajak

Penghasilan (PPh) bagi mereka yang memperoleh keuntungan dari penjualan emas.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan pengawasan dan audit untuk memastikan kepatuhan pajak oleh pelaku pasar. PPN yang dikenakan adalah 0% sampai dengan 1,65% untuk transaksi emas. PPN dengan persyaratan tertentu mendapat fasilitas tidak dipungut. PPh dikenakan berdasarkan tarif progresif yang tergantung pada jenis transaksi dan besarnya keuntungan yang diperoleh, sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pajak ini bisa berbeda tergantung pada status kepemilikan dan jenis transaksi emas, serta apakah seseorang dikategorikan sebagai pedagang atau investor.

Pajak emas ini tentu memberikan dampak baik positif maupun negatif. Dampak positif berupa peningkatan pendapatan ne-

gara dan regulasi pasar. Sementara untuk dampak negatif antara lain pengenaan pajak dapat menyebabkan harga emas di pasar

sedikit lebih tinggi karena pedagang cenderung akan membebankan pajak pada konsumen sehingga menyebabkan berkurangnya minat investasi emas bagi beberapa investor. Proses administrasi yang lebih rumit dapat membebani para pelaku usaha kecil atau masyarakat yang tidak terbiasa dengan pajak.

Secara keseluruhan, kebijakan pajak emas berfungsi untuk mendukung perekonomian negara, tetapi juga memiliki tantangan dalam hal implementasi dan dampaknya terhadap harga emas dan minat investasi masyarakat. Penting untuk diingat bahwa semua investasi mengandung risiko termasuk emas. Pilihan investasi dikembalikan ke masyarakat dengan terlebih dahulu mengetahui tentang potensi manfaat dan risiko investasi emas ini. □-d

\*) **Opera Agus Yudi Utomo**, Penulih Pajak KPP Pratama Jakarta Kembangan